

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL
(STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RHEZA RAHADHITYA
NIM. 12030110120081**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL
(STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RHEZA RAHADHITYA
NIM. 12030110120081**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rheza Rahadhitya

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120081

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT
INTERNAL (Studi pada Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah)**

Dosen Pembimbing : Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt

Semarang, 31 Agustus 2015
Dosen Pembimbing,

Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt
NIP. 196208131990011001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rheza Rahadhitya

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120081

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT
INTERNAL (Studi pada Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah)**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 14 September 2015

Tim penguji:

1. Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt. (.....)
2. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA., MAcc., Akt. (.....)
3. Drs. Agustinus Santosa A., MSi., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Rheza Rahadhitya, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Audit Internal (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 September 2015
Yang membuat pernyataan,

Rheza Rahadhitya
NIM. 12030110120081

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Smart doesn’t come out from books. Smart is making the right decision at the right time.”

-Daredevil-

“Nothing worth having was ever achieved without effort.”

-Theodore Roosevelt-

“Be rich enough that nobody can tell what you to do.”

-Dan Bilzerian-

“Hard work pays off, you get what you put in.”

-Ludacris-

“Mr. Tired never owned a Vertu.”

-Rheza Rahadhitya-

Persembahan untuk: Mama, Papa, Adek, Bella, dan ASOY.

May you all find happiness everyday.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengalaman auditor, manajemen risiko, pendidikan, pelatihan, efektivitas pengendalian internal, dan *management support* terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 33 orang. Dikarenakan jumlah populasi yang sedikit maka penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner kepada 33 auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS 20.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman auditor, pendidikan, pelatihan, dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal. Sedangkan manajemen risiko dan *management support* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas audit internal.

Kata kunci : efektivitas audit internal, pengalaman auditor, manajemen risiko, pendidikan, pelatihan, efektivitas pengendalian internal, *management support*.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of auditor experience, risk management, education, training, effective internal control system, dan management support on internal audit effectiveness in Inspectorate of Cental Java.

The population of this study are the auditors of Inspectorate of Central Java which totaling 33 peoples. Because the small number of the population, therefore in this study is using census method, which uses the population as a sample. The data for this study were obtained through a questionnaire administrated to the auditors in Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. The data were analyzed using SPSS version 20, hence the hypotesis are tested by the multiple regression analysis.

The result showed that auditor experience, education, training and effective internal control system has significant positive effect on internal audit effectiveness. Whereas risk management and management support has no significant effect on internal audit effectiveness.

Keywords : internal audit effectiveness, auditor experience, risk management, education, training, effective internal control system, and management support.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Audit Internal (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang membantu dan berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt. selaku dosen pembimbing dan ketua penguji skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan bersedia meluangkan waktu.
3. Bapak Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses masa studi, terlebih saat semester-semester awal.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

5. Keluargaku tercinta dan tersayang, Agus Raharjo, Riena Retnaningrum, Rafdan, Mida, dan Yarra yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus. Berkat doa dan usaha kalian semua akhirnya skripsi ini selesai. I love you all most.
6. Ashri Bella Dina terima kasih untuk doa, dukungan, ilmu, dan waktu yang telah diberikan selama ini. Once again thank you very much.
7. Sahabatku Rangga Dwi Anggono, Yohan Mandala, Krisna Yuda, dan Farrah Amril yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
8. *ASOY thanks for being my motivation for my whole life.*
9. Sindu Pradipto teman seperjuangan skripsi yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
10. Teman-teman PEDAS yang selalu menghibur dan menyenangkan.
11. Teman-teman Cumekers yang selalu menghibur dan menyenangkan.
12. Teman-teman Akuntansi 2010 yang selalu memberikan pengalaman yang menyenangkan selama masa perkuliahan dan hingga saat ini.
13. Tim KKN Desa Purwodadi yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam penelitian ini.
15. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak.

Semarang, 1 September 2015
Penulis,

Rheza Rahadhitya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.5. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Landasan Teori	20
2.1.1. <i>Contingency Theory</i>	20
2.1.2. Auditor Internal Sektor Publik.....	21
2.1.3. Efektivitas Audit Internal	23
2.1.3.1. Pengertian Efektivitas.....	23
2.1.3.2. Pengertian Audit Internal.....	23
2.1.4. Fungsi dan Tujuan Audit Internal.....	25

2.1.5.	Ruang Lingkup Audit Internal.....	25
2.1.6.	Tahapan Audit Internal.....	25
2.1.7.	Pengalaman Auditor.....	27
2.1.7.1.	Pengertian Pengalaman Auditor	27
2.1.8.	Manajemen Risiko	28
2.1.8.1.	Pengertian Manajemen Risiko.....	29
2.1.8.2.	Penilaian Risiko.....	30
2.1.9.	Pendidikan	31
2.1.9.1.	Pengertian Pendidikan	31
2.1.9.2.	Dampak Pendidikan Bagi Auditor.....	32
2.1.10.	Pelatihan	33
2.1.10.1.	Pengertian Pelatihan.....	33
2.1.10.2.	Pelatihan Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	34
2.1.11.	Efektivitas Pengendalian Internal	35
2.1.10.3.	Pengertian Efektivitas	35
2.1.10.4.	Pengertian Pengendalian Internal	35
2.1.10.5.	Pengendalian Internal Dalam Pemerintah Daerah	37
2.1.12.	<i>Management Support</i>	38
2.1.10.6.	Pengertian <i>Management Support</i>	38
2.1.10.7.	Praktik <i>Management Support</i> di Pemerintah Daerah.....	38
2.2.	Penelitian Terdahulu	39
2.3.	Kerangka Pemikiran	43
2.4.	Pengembangan Hipotesis	45
2.4.1.	Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	46
2.4.2.	Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	47

2.4.3. Pengaruh Pendidikan Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	48
2.4.4. Pengaruh Pelatihan Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	49
2.4.5. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	50
2.4.6. Pengaruh <i>Management Support</i> Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi	52
3.1.1. Variabel Dependen.....	52
3.1.1.1. Efektivitas Audit Internal.....	52
3.1.2. Variabel Independen.....	53
3.1.2.1. Pengalaman Auditor.....	53
3.1.2.2. Manajemen Risiko	54
3.1.2.3. Pendidikan.....	55
3.1.2.4. Pelatihan.....	56
3.1.2.5. Efektivitas Pengendalian Internal	57
3.1.2.6. <i>Management Support</i>	58
3.2. Populasi Penelitian.....	59
3.3. Sensus.....	59
3.4. Jenis dan Sumber Data	60
3.5. Metode Pengumpulan Data	60
3.6. Metode Analisis Data.....	61
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	61
3.6.2. Uji Instrumen	61
3.6.2.1. Uji Reliabilitas	61
3.6.2.2. Uji Validitas.....	62
3.6.3. Uji Asumsi Klasik	62
3.6.3.1. Uji Normalitas	63

3.6.3.2.	Uji Heterokedastisitas	63
3.6.3.3.	Uji Multikolinearitas	64
3.6.4.	Pengujian Hipotesis	64
3.6.4.1.	Analisis Regresi Berganda	64
3.6.4.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	65
3.6.4.3.	Uji Hipotesis (Uji t).....	66
3.6.5.	Koefisien Determinasi (R^2).....	66
 BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....		67
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	67
4.2.	Statistik Deskriptif	69
4.2.1.	Efektivitas Audit Internal	70
4.2.2.	Pengalaman Auditor.....	70
4.2.3.	Manajemen Risiko	70
4.2.4.	Pendidikan	70
4.2.5.	Pelatihan	71
4.2.6.	Efektivitas Pengendalian Internal	71
4.2.7.	<i>Management Support</i>	71
4.3.	Uji Instrumen.....	71
4.3.1.	Uji Reliabilitas	71
4.3.2.	Uji Validitas.....	72
4.4.	Uji Asumsi Klasik	74
4.4.1.	Uji Normalitas.....	74
4.4.2.	Uji Heterokedastisitas	74
4.4.3.	Uji Multikolinearitas	76
4.5.	Uji Hipotesis.....	76
4.5.1.	Analisis Regresi Berganda.....	76
4.5.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	78
4.5.3.	Uji Hipotesis (Uji t).....	79
4.6.	Koefisien Determinasi (R^2).....	81
4.7.	Interpretasi Hasil.....	82

4.7.1. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	82
4.7.2. Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	83
4.7.3. Pengaruh Pendidikan Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	84
4.7.4. Pengaruh Pelatihan Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	84
4.7.5. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Audit Internal	84
4.7.6. Pengaruh <i>Management Support</i> Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	85
BAB V PENUTUP	87
5.1. Kesimpulan	87
5.1.1. Hipotesis Diterima	87
5.1.2. Hipotesis Ditolak	88
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	88
5.3. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner	67
Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden	68
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	69
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	72
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	72
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	76
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	77
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	79
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	80
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pidana Korupsi Berdasarkan Sektor	3
Gambar 1.2 Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi	4
Gambar 1.3 Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi	4
Gambar 1.4 Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4.1 <i>Normal Probability Plot</i>	74
Gambar 4.2 <i>Scatterplot</i>	75

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Surat Ijin Penelitian.....	93
Lampiran B Kuesioner Penelitian.....	95
Lampiran C Surat Keterangan Penelitian.....	106
Lampiran D Tabulasi Data Responden.....	108
Lampiran E Output SPSS.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara mengenai perjalanan dan perkembangan otonomi daerah di Indonesia dengan segala aspeknya mengurai suatu kisah yang panjang. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting dalam rangka perwujudan desentralisasi dan dekonsentrasi. Langkah-langkah penting yang diambil pemerintah terlihat dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang masing-masing dengan sistemnya sendiri.

Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota dengan maksud mewujudkan:¹

1. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik;
2. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
3. pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta

¹ Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

antar □ daerah.

Guna mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan tatanan sistem pemerintahan yang baik yang mampu menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Kelemahan yang paling menonjol dalam proses tercapainya *good governance* di Indonesia selama ini adalah masih tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang bahkan telah mengakar di hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor publik maupun swasta dan sering pula terjadi di kedua sektor tersebut secara bersamaan.

Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang telah menjadi permasalahan dan bisa membahayakan serta merugikan negara maupun masyarakat karena dapat berdampak secara umum pada:²

1. rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik;
2. timbulnya ekonomi biaya tinggi;
3. berkurangnya penerimaan negara/pemerintahan daerah;
4. runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi;
5. membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum;
6. meningkatkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat;
7. bertambahnya masalah sosial dan kriminal;

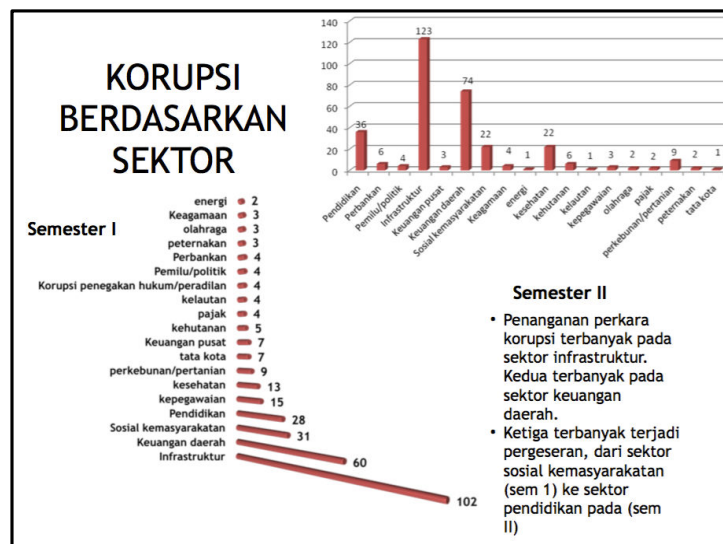
² Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

8. adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi.

Lord Acton menyatakan, *power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*.

Berdasarkan data penanganan tindak pidana korupsi semester I dan II tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikategorikan menjadi 3 yaitu berdasarkan profesi, instansi dan sektor. Berikut dijelaskan pada gambar-gambar dibawah ini secara rinci.

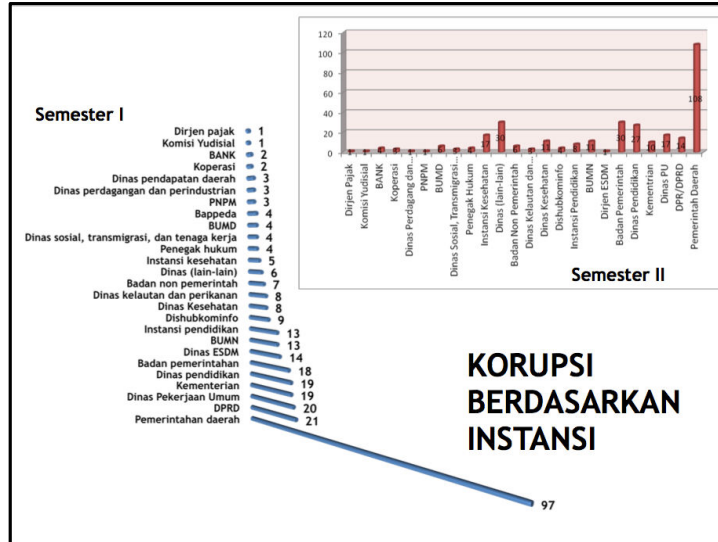
Gambar 1.1
Pidana Korupsi Berdasarkan Sektor



Sumber: ICW Laporan semester I dan II tahun 2014

Pada gambar 1.1 dijelaskan mengenai penanganan tindak pidana korupsi dari berbagai sektor yang ada di Indonesia, terlihat jelas bahwa pada semester I dan II penanganan korupsi pada sektor keuangan daerah berada di nomor 2 yaitu sejumlah 60 dan 74, terbanyak setelah sektor infrastruktur.

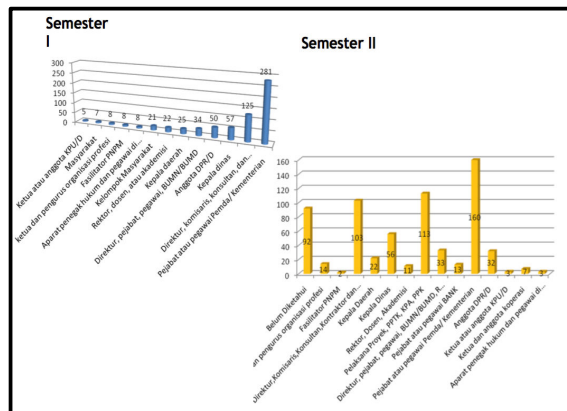
Gambar 1.2
Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi



Sumber: ICW Laporan semester I dan II tahun 2014

Pada gambar 1.2 dijelaskan mengenai penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan instansi. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa pemerintah daerah berada pada urutan pertama baik di semester I dan II dengan jumlah kasus sebanyak 97 dan 108.

Gambar 1.3
Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi



Sumber: Laporan ICW semester I dan II tahun 2014

Pada gambar 1.3 dijelaskan mengenai penanganan tindak pidana korupsi

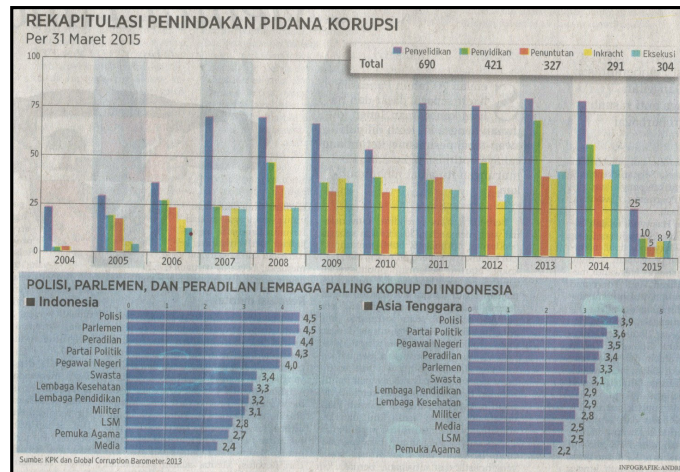
berdasarkan profesi. Terlihat jelas bahwa pada urutan pertama ditempati oleh pejabat atau pegawai pemda/kementrian baik pada semester I dan II dengan jumlah 281 dan 160.

Bersumber dari ketiga gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini masih banyak sekali praktik-praktik korupsi yang terjadi di daerah baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu diindikasikan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol di tingkat daerah yang berakibat pada maraknya praktik tindak pidana korupsi.

Data lain yang bersumber dari harian Kompas menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia dari berbagai elemen dan tingkat penindakannya selama 11 tahun terakhir. Bersumber dari data tersebut, pegawai negeri sipil (PNS) menduduki peringkat kelima dari 12 elemen yang ada di Indonesia dengan skala 4 dari 5, sedangkan untuk tingkat Asia Tenggara menduduki peringkat ketiga dengan skala 3,5 dari 5³. Penjelasan secara rinci terdapat pada gambar 1.4 dibawah ini.

³ Kompas, Kamis, 28 Mei 2015

Gambar 1.4
Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi



Sumber: Kompas, Kamis, 28 Mei 2015

Berdasarkan dari gambar diatas diketahui bahwa tingkat korupsi di sektor publik baik di pusat maupun daerah masih tergolong tinggi. Dengan tingginya tingkat korupsi tersebut, diindikasikan bahwa peran lembaga pengawasan belum berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Sehingga untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dirasa sulit, dikarenakan masih terdapat “celah-celah” yang dapat dijadikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan utamanya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan terwujud jika sistem pengawasannya dapat berfungsi dengan baik, efektif, dan efisien. Dengan demikian sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2005, h.189), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana awal. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah dan diharapkan independen dari pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai tingkat provinsi/kabupaten/kota, hingga tingkat departemen.

Inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dan pengawasan khusus pada SKPD yang ada setiap provinsi/kabupaten/kota.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat. Abdul dan Muhammad (2012, h.38), adapun tugas pokok Inspektorat yaitu:

- 1) Inspektorat adalah unsur penunjang pemerintah, dipimpin oleh seorang inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- 2) Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam bidang pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat sebagai perangkat daerah dibawah gubernur yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama halnya dengan auditor internal dalam sebuah perusahaan. Menurut Bastian (2014) audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah.

Suatu organisasi yang memiliki fungsi audit internal yang efektif cenderung lebih baik dibanding suatu organisasi yang tidak memiliki fungsi tersebut, terlebih untuk pendeteksian dan pencegahan terhadap kecurangan. Selain itu dengan adanya fungsi audit internal yang efektif dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi (Badara dan Saidin, 2014). Jika fungsi

audit internal berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat membantu terwujudnya praktik *good governance* di dalam suatu organisasi.

Pengertian audit internal menurut Boynton *et al.* (2001, h.983) adalah sebagai berikut:

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan di daerah.

Inspektorat provinsi/kabupaten/kota yaitu merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Peran dan fungsi Inspektorat provinsi/kabupaten/kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat provinsi/kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan program pengawasan;
2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Optimalisasi peran Inspektorat dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya *good governance*, dapat dilakukan dengan:⁴

1. penyempurnaan kebijakan, pola dan sistem pengawasan;
2. pemantapan kedudukan dan peran organisasi pengawasan; □
3. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM); □
4. meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
5. optimalisasi anggaran; □
6. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Aparat Pengawasan Intern □ Pemerintah (APIP) dan pengawas eksternal;
7. membangun kerjasama secara vertikal dan horisontal dengan berbagai □ pihak.

Proses reformasi di dalam praktiknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-

⁴ Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat, yaitu:⁵

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif.

Saat ini penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (obrik) saja, belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik. Hal ini mengakibatkan munculnya kendala terhadap laporan hasil pemeriksaan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja yang tinggi, yang disamakan dengan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal.

2. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai. □

Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara

⁵ Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan.

3. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah koordinasi antar APIP masih dirasakan lemah yang mana masing-masing APIP cenderung menjalankan kegiatan yang ada secara individu. Hal ini perlu dicermati mengingat indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah terkait bidang pengawasan, yaitu jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan opini WTP, sangat bergantung kepada APIP di kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

5. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah.

Saat ini di jajaran Inspektorat daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk dibawah BPKP, sementara P2UPD berada dibawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.

6. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pembentukan Unit Penggerak Integritas, belum seluruhnya ditindaklanjuti. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat.

7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan.

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat

Provinsi Jawa Tengah masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam menciptakan *good governance* di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu dapat terwujud jikalau berbagai pihak yang terkait baik eksternal dan internal ikut serta dalam mendorong terwujudnya hal tersebut.

Salah satu bentuk kongkrit dari perwujudan *good governance* adalah sistem pemeriksaan yang baik, efektif, dan efisien. Tentunya hal tersebut yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah seperti yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra) menjadi dasar penentuan permasalahan dalam penelitian ini.

Permasalahan pertama adalah belum adanya penentuan target dan kinerja secara komprehensif, penentuan target hanya didasarkan pada jumlah obyek pemeriksaan (obrik) saja. Bahkan penentuan skala prioritas terhadap obyek pemeriksaan tersebut belum dilaksanakan, sehingga tidak diketahui nilai strategis, beban kerja, dan risiko atas obyek pemeriksaan tersebut.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah keterbatasan sumber daya manusia di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Mengingat jumlah auditor hanya sebanyak 33 orang, jumlah tersebut masih jauh dari jumlah ideal auditor yang tertulis dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 48 orang. Minimnya jumlah auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menjadikan proses pengawasan dan pembinaan yang kurang optimal, selain itu terdapat jabatan fungsional auditor (JFA) yang tingkat kompetensinya belum memadai. Lalu kurang efektifnya penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang diperuntukan untuk auditor dan penempatan pejabat struktural belum mempertimbangkan latar belakang di bidang pengawasan.

Sampai saat ini struktur eselon di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih sejajar dengan SKPD, hal tersebut berdampak kepada kurangnya tingkat responsivitas SKPD sebagai *auditee* terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian (*research question*) yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014). Briggs and Coleman (2007) dalam Sugiyono (2014, h.88) menyatakan bahwa:

Research questions are the vital first step in any research. They guide you to toward the kind of information you need and the ways you should collect the information. The also help you to analyze the information you have collect.

Bentuk rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumusan masalah asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Di mana rumusan

masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal?
2. Apakah manajemen risiko berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal?
3. Apakah pendidikan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal?
4. Apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal?
5. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal?
6. Apakah *management support* berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengalaman auditor terhadap efektivitas audit internal.

2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh manajemen risiko terhadap efektivitas audit internal.
3. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pendidikan terhadap efektivitas audit internal.
4. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pelatihan terhadap efektivitas audit internal.
5. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap efektivitas audit internal.
6. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *management support* terhadap efektivitas audit internal.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai pengaruh pengalaman auditor, manajemen risiko, pendidikan dan pelatihan, efektivitas pengendalian internal, dan *management support* terhadap efektivitas audit internal.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk menjadikan Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah yang berkualitas dan kompeten.

1.5.Sistematika Penulisan

Merupakan tata urutan penulisan penelitian ini dan dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses penyusunan penelitian. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori, konsep, penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, serta definisi dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai populasi dan sampel, sumber, jenis data, dan alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian, dimana landasan teori ini merupakan sebuah karakteristik bahwa penelitian itu merupakan sebuah karya ilmiah dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah *contingency theory*.

2.1.1. Contingency Theory

Contingency theory merupakan sebuah teori dasar yang sering kali digunakan dalam penelitian mengenai akuntansi manajemen dan audit. Meskipun dalam penerapannya teori ini memiliki efek yang berbeda tergantung pada pengaplikasiannya dan lingkungan. *Contingency theory* menurut Daft (2009, h.26) adalah:

Contingency means that one thing depends on other things, and for organizations to be effective, there must be a “goodness of fit” between their structure and the conditions in their external environment.

Badara dan Saidin (2014) berpendapat bahwa *contingency theory* mampu membantu peneliti untuk menjelaskan secara sistematis mengenai sebuah fenomena. Dan teori ini mampu menjelaskan hubungan antara 2 variabel atau lebih.

Efektivitas audit internal merupakan sesuatu yang harus dicapai dan diwujudkan. Hal tersebut tentunya tidak akan dapat tercapai jikalau tidak ada

faktor-faktor yang mendukung untuk mencapai dan mewujudkan hal tersebut.

Dalam penelitian ini efektivitas audit internal bergantung pada *contingency variables* (variabel-variabel penghubung) yaitu pengalaman auditor, manajemen risiko, pendidikan, pelatihan, efektivitas pengendalian internal, dan *management support*.

2.1.2. Auditor Internal Sektor Publik

Tidak jauh berbeda antara auditor internal sektor publik dengan sektor swasta, hanya peraturan-peraturan yang mengikat dan lingkungan-lingkungannya saja yang berbeda. Perbedaan yang menonjol adalah adanya pengaruh politik yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan audit internal pemerintah. Yang terkadang pengaruh politik tersebut dapat juga mempengaruhi hasil dari audit internal tersebut.

Tuntutan dilakukannya audit internal di sektor publik adalah dalam rangka mewujudkan *good governance* yang merupakan elemen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi kepada masyarakat. Meskipun dalam praktiknya terkadang masih jauh dari harapan.

Dalam hal ini Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga pengawasan tingkat provinsi yang berperan sebagai auditor internal sektor publik yang tugas dan fungsinya diatur dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 2: Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 3: Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi: 1) perencanaan program pengawasan; 2) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan; 3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; 4) evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; 5) pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diperjelas dan dijabarkan secara rinci melalui pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 2: Tujuan kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015: a) mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian/Inspektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota; b) meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 3: Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: a) peningkatan kinerja SKPD/unit kerja lingkup pemerintahan provinsi; b) pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah; c) percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal diatas, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab penuh terhadap pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Bilamana tugas dan fungsi tersebut dijalankan dengan baik, efektif, dan efisien maka pencapaian tujuan yang tertuang dalam visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan terwujud. Visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah itu sendiri adalah menjadi APIP yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah di

Jawa Tengah. Serta implementasi dari pasal-pasal yang terdapat pada peraturan gubernur dapat terwujud dengan baik.

2.1.3. Efektivitas Audit Internal

2.1.3.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Anthony dan Govindarajan (2005) adalah hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut karena baik tujuan maupun input sangatlah sukar dikuantifikasikan.

Menurut Mardiasmo (2004), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Siagian (2001) mengartikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan definisi diatas, efektivitas merupakan ukuran keberhasilan bagi suatu organisasi, sampai seberapa jauh mana organisasi dinyatakan berhasil dalam usahanya mencapai tujuan tersebut.

2.1.3.2. Pengertian Audit Internal

Berbeda halnya dengan audit eksternal, menurut Bastian (2014, h.8) menyatakan bahwa:

Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan

membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah.

Agoes (2004) berpendapat bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian independen dalam organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Tugiman, 1997).

Dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan bagian atau proses pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan akan tercapai dengan baik.

Bila dikaitkan dengan efektivitas, maka efektivitas audit internal merupakan kemampuan auditor internal untuk mencapai atau mewujudkan fungsi dari audit internal. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku auditor internal di tingkat provinsi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk dapat mewujudkan dan mencapai tujuan dan fungsi dari efektivitas audit internal itu sendiri melalui program-program dan fasilitasi pengawasan yang telah direncanakan.

2.1.4. Fungsi Dan Tujuan Audit Internal

Audit internal merupakan “mata dan telinga” bagi manajemen di suatu organisasi untuk memastikan bahwa program-program kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tidak dilakukan secara menyimpang (Tampubolon, 2005). Terkait dengan fungsi tersebut audit internal diharapkan mampu memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Audit internal bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada organisasi, dalam rangka membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan yang diberikan sebagai tujuan akhir adalah agar semua anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya secara efektif atau lebih jauh lagi mencapai efektivitas optimal. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa.

2.1.5. Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup audit internal yaitu menilai keefektifan sistem pengendalian internal, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan yang berguna untuk pencapaian tujuan suatu organisasi.

2.1.6. Tahapan Audit Internal

Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh auditor internal dalam proses audit untuk menentukan

prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit internal. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, menurut Tugiman (2006, h.53) adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan audit

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses audit.

2. Tahap pengujian dan evaluasi informasi

Pada tahap ini audit internal diwajibkan untuk mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran dan keandalan informasi untuk mendukung hasil audit.

3. Tahap penyampaian hasil audit

Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, menentukan ditaati atau tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Pada proses audit internal diwajibkan untuk melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi organisasi dan memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.

4. Tahap tindak lanjut (*follow up*) hasil audit.

Tahap tindak lanjut (*follow up*) bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi atas temuan-temuan audit sudah dilakukan dengan baik, dan memastikan apakah rekomendasi-rekomendasi tersebut memberikan hasil sesuai yang diharapkan.

Tahapan audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tidaklah jauh berbeda dengan tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Tugiman (2006). Tahapan audit internal sesuai dengan SOP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. pelaporan.

2.1.7. Pengalaman Auditor

2.1.7.1. Pengertian Pengalaman Auditor

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.

Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktik seperti yang diungkapkan oleh Knoers dan Hadinoto (dalam Asih, 2006). Purnamasari dalam (Asih, 2006) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang

memiliki pengalaman pekerjaan yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya:

1. mendekteksi kesalahan;
2. memahami kesalahan;
3. mencari penyebab munculnya kesalahan.

Pengalaman kerja menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, maka semakin terampil dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikiran dan bersikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Puspaningsih, 2004).

Berdasarkan penjabaran diatas, pengalaman auditor adalah sebuah pengetahuan dan kemampuan auditor yang di dapatkan selama auditor melakukan *auditing* baik dari segi lamanya waktu atau jumlah penugasan yang pernah dilakukannya.

2.1.8. Manajemen Risiko

Setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah perlu dikembangkan lebih lanjut.

Implementasi manajemen risiko di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.8.1. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko merupakan suatu hal yang dapat berakibat buruk terhadap suatu organisasi, bahkan sampai pada titik kehancuran. Oleh karena itu risiko sangatlah penting untuk dikelola, hal tersebut bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi dapat mempertahankan eksistensinya atau mengoptimalkan risiko. Suatu organisasi seringkali secara sengaja mengambil suatu risiko tertentu, karena melihat suatu keuntungan dibalik risiko tersebut. Jadi pengambilan risiko oleh organisasi harus diimbangi oleh suatu perhitungan yang matang dan cermat.

Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (SBC Warburg dalam Mamduh, 2009).

Kumaat (2011) menyebutkan manajemen risiko merupakan sebuah tindakan terencana dan berkesinambungan untuk meminimalisir adanya ketidakpastian di masa depan dengan cara mereduksi faktor-faktor penyebab risiko.

Berdasarkan pengertian diatas manajemen risiko adalah sebuah tindakan proaktif dan bersifat pencegahan, guna mereduksi hal-hal yang dapat merugikan suatu organisasi di masa depan. Terlebih dengan adanya manajemen risiko yang baik dapat mereduksi risiko-risiko yang bersifat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

2.1.8.2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan unsur penting Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penilaian risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan dikelola oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dalam tahapan ini akan digali risiko yang akan dikelola dengan mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi.

2. Analisis Risiko

Tujuan dari tahapan ini adalah memisahkan risiko tingkat rendah dengan risiko tingkat sangat tinggi serta menyediakan data untuk tahapan evaluasi dan penanganan risiko. Analisis risiko dilakukan untuk menentukan probabilitas atau seberapa sering timbulnya risiko dan seberapa besar pengaruh dampak negatifnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2.1.9. Pendidikan

2.1.9.1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan lembaga bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan menumbuhkan sikap, kepercayaan, nilai, jiwa sosial, dan keterampilan yang menunjang dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sihombing dkk. (2003), tujuan pendidikan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeahlian, berdaya saing, memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, mandiri, menguasai pengetahuan dan teknologi, berahlak mulia, beriman, maju, sejahtera, dan cinta tanah air.

Pendidikan menurut Notoatmodjo (1992) adalah proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002), pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Berdasarkan penjelasan diatas pendidikan mempunyai arti yang lebih luas dari pelatihan, pendidikan menyangkut aspek keterampilan dalam bidang pengetahuan dan pembentukan kepribadian, pengembangan wawasan dan daya nalar, dan etika sosial. Sedangkan pelatihan pada umumnya hanya menyangkut aspek keterampilan saja.

2.1.9.2. Dampak Pendidikan Bagi Auditor

Jelas terlihat perbedaan antara pendidikan dengan pelatihan, dimana pendidikan lebih berdampak luas bagi individu dalam hal ini adalah auditor. Jika berbicara mengenai tingkat pendidikan bagi auditor, jelas sekali terlihat perbedaan antara auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sebagai contoh auditor yang memiliki gelar magister atau S2 akan dinilai lebih tinggi secara akademis dibanding auditor yang hanya bergelar sarjana atau S1.

Tingkat pendidikan juga dapat menjadi tolak ukur kualitas auditor secara individu, bahkan dapat menjadi pertimbangan lain bagi manajemen untuk mempromosikan auditor ke jabatan yang lebih tinggi atau kenaikan pangkat.

Terkait dengan kenaikan pangkat auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, seperti yang tertulis dalam ayat 1 dan 2 pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 menyatakan bahwa:

1. Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama;
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengawasan;
 - c. pengembangan profesi.

Seperti yang dijelaskan pada ayat diatas, bahwa kenaikan pangkat auditor di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode angka kredit. Dimana setiap auditor yang sudah memiliki angka kredit melebihi

angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat, maka auditor tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

2.1.10. Pelatihan

2.1.10.1. Pengertian Pelatihan

Peningkatan kompetensi sangat penting bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas dan eksistensi. Pemanfaatan peluang atau sumber daya merupakan salah satu penunjang siklus organisasi, oleh karena itu perlu pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tingkat kompetensi yang ditetapkan atau disyaratkan agar keberhasilan organisasi dapat tercapai. Sebagai langkah awal adalah organisasi mengukur kemampuan dan kelemahan anggotanya atau sumber daya manusianya untuk kemudian merencanakan pelatihan yang sesuai agar kelemahannya dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

Pelatihan merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan (Kaswan, 2011). Melalui proses tersebut terdapat kemungkinan perubahan sikap karyawan, di mana kinerjanya menjadi lebih efektif. Pelatihan juga dapat dilakukan pada semua tingkat organisasi, pada tingkat bawah pelatihan berisikan pengajaran bagaimana mengerjakan suatu tugas. Sedangkan untuk tingkat atas lebih sering menggunakan istilah pengembangan.

Menurut Suwardjono (1992), bahwa pendidikan yang diperoleh auditor di bangku kuliah tidaklah cukup untuk pengembangan karir. Kerangka konseptual dan penalarannya harus dimiliki agar auditor dapat bersikap kreatif

dan inovatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan praktik langsung dan mengikuti banyak pelatihan.

Departemen Pendidikan Nasional (2002) menyebutkan bahwa pelatihan merupakan sebuah proses, cara, perbuatan melatih.

Pelatihan dapat disimpulkan sebagai sebuah proses atau cara yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan karyawan guna mempermudah melakukan pekerjaannya.

2.1.10.2. Pelatihan Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara rutin melakukan pelatihan baik di tingkat pusat maupun daerah, hal tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Pelatihan auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. diklat yang terencana;
2. diklat yang tak terencana.

Perbedaan diklat terencana dengan tak terencana hanya terletak pada sumber dan waktu pelaksanaannya saja. Diklat yang terencana sudah direncanakan dan dijadwalkan oleh sub bagian perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan waktu pelaksanaannya sudah terjadwal dengan baik. Sedangkan diklat yang tak terencana bersumber dari instansi terkait (yang mengadakan

pelatihan auditor) dan bersifat mendadak (waktu dilaksanakan tidak terjadwal melainkan sewaktu-waktu).⁶

2.1.11. Efektivitas Pengendalian Internal

2.1.11.1. Pengertian Efektivitas

Arens *et al.* (2008) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut, efektivitas merujuk ke pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengacu ke sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Handoko (2001) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan pengertian yang diungkapkan oleh Handayani (2002) efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran, yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, penilaian efektivitas didasarkan atas sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai dan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.11.2. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal dalam suatu organisasi merupakan suatu bentuk pengawasan tersendiri atau kegiatan monitoring bagi organisasi tersebut dalam pencapaian tujuan. Tentunya suatu organisasi pasti memiliki suatu tujuan yang tidak akan mudah untuk dicapai begitu saja, selain dari faktor sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaku dalam hal ini adalah para karyawan.

⁶ SOP Pelaksanaan Diklat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (IPPJT.SAU.SOP.04)

Pimpinan organisasi tersebut haruslah lebih mengerti mengenai pencapaian tujuan tersebut, tidak hanya itu saja bagaimana proses tersebut akan terjadi dan apa saja yang harus dilakukan. Oleh sebab itu pengendalian internal merupakan elemen penting dalam organisasi dikarenakan hal ini merupakan pengontrol antara banyak pihak yang memiliki andil dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut dan yang tidak kalah penting adalah implementasi pengendalian internal yang baik dapat mendeteksi dan mencegah pelanggaran dan kecurangan yang terjadi.

Pengendalian internal adalah representasi dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, di mana prosesnya yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 2013).

Hal ini juga dijelaskan oleh Cuomo (2007), bahwa dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit ataupun non profit dapat melindungi aset perusahaan dari kecurangan dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Kumaat (2011) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pengendalian internal merupakan sebuah proses yang merepresentasikan seluruh kegiatan

perusahaan, termasuk di dalamnya kegiatan pengawasan yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.11.3. Pengendalian Internal dalam Pemerintah Daerah

Bentuk pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berupa fungsi pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara baik, efektif, dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga yang berperan sebagai pengawas internal tingkat provinsi, Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada gubernur, dengan mendapat pembinaan teknis dari sekretaris daerah. Dan Inspektorat harus memastikan apakah kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur telah dipatuhi dan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi keuangan dan non-keuangan yang dihasilkan oleh berbagai SKPD sebagai bagian yang terintegral dalam organisasi pemerintah daerah.

Dengan di implementasikannya pengendalian internal secara baik, efektif, dan efisien diharapkan akan menimbulkan dampak positif berupa tindakan pencegahan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pelayan publik dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain. Dalam arti lain dapat mereduksi terjadi praktik korupsi.

2.1.12. Management Support

2.1.12.1. Pengertian Management Support

Mihret dan Yismaw (2007) menyatakan bahwa *management support* merupakan salah satu faktor penting disamping kualitas audit internal guna mewujudkan efektivitas audit internal. Dalam penelitiannya Hailemariam (2014) menyatakan bahwa:

Management support is expressed in terms of supporting the auditing process by fulfilling the necessary resources, finance, transport if required, providing training, introducing auditors with new technology and procedures, budgeting funds for certification and other facilities that facilitate the internal auditing works.

Konteks *management support* yang dimaksud adalah tingkat responsivitas dari *auditee* dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit yang telah diberikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, serta adanya komitmen untuk menjadikan organisasi menjadi lebih baik kedepannya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *management support* merupakan sebuah faktor penting yang mempengaruhi efektivitas audit internal, dan menekankan pada tingkat responsivitas atau *feedback* terhadap temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

2.1.12.2. Praktik Management Support di Pemerintah Daerah

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terhadap peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah. Kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan paling lambat 60

hari kalender setelah diterimanya laporan hasil pengawasan serta wakil gubernur dan wakil bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan seperti halnya yang tertuang dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015.

Penjelasan diatas menggambarkan kondisi ideal yang seharusnya terjadi, tetapi pada kenyataanya hal tersebut tidak terealisasi. Hal tersebut dikarenakan munculnya mandat penguatan struktur eselon bagi Inspektur selaku pimpinan tertinggi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sampai pada saat ini struktur eselon bagi Inspektur masih setingkat dengan Kepala SKPD, untuk kedepannya struktur eselon bagi Inspektur dapat setingkat dengan sekretaris daerah. Jikalau hal tersebut dapat terwujud maka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat akan lebih kuat dan jauh lebih baik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh variabel-variabel yang memengaruhi efektivitas audit internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Badara dan Saidin (2014) tentang *Empirical Evidence of Antecedents of Internal Audit Effectiveness from Nigerian Perspective*, menggunakan variabel independen yaitu manajemen risiko, *effective internal control system*, pengalaman audit, *cooperation between internal and external auditors*, dan *performance measurement*. Sedangkan variabel dependennya adalah efektivitas audit internal. Hasil penelitian menunjukkan manajemen risiko, *effective internal control system*,

pengalaman audit, *cooperation between internal and external auditors*, dan *performance measurement* berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mihret dan Yismaw (2007) tentang *Internal Audit Effectiveness: an Ethiopian Public Sector Case Study*, menggunakan variabel independen yaitu *management support*, *organizational setting*, kualitas audit internal, dan *auditee attributes*. Sedangkan variabel dependennya adalah efektivitas audit internal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *management support*, *organizational setting*, dan kualitas audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal. Tetapi *auditee attributes* tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal.

Peneliti lain juga melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas audit internal, berbeda dengan sebelumnya Beasley, Clune, dan Hermanson (2006) menguji pengaruh manajemen risiko terhadap efektivitas audit internal. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara manajemen risiko terhadap efektivitas audit internal.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Variabel		Hasil
			Dependen	Independen	
1	Badara dan Saidin	2014	Efektivitas Audit Internal	Pengalaman Audit	Pengalaman audit berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal.
2	Badara dan Saidin	2014	Efektivitas Audit Internal	Manajemen Risiko	Manajemen risiko, <i>effective internal control system</i> , pengalaman audit, <i>cooperation between internal and external auditor</i> , dan <i>performance measurement</i> berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal.
				<i>Effective Internal Control System</i>	
				Pengalaman Audit	
				<i>Cooperation Between Internal and External Auditors</i>	
3	Badara dan Saidin	2013	Efektivitas Audit Internal	Pengalaman Audit	Pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal.

4	Mihret dan Yismaw	2007	Efektivitas Audit Internal	<i>Management Support</i>	<i>Management support, organizational setting, dan kualitas audit internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal. Akan tetapi auditee attributes tidak berpengaruh signifikan.</i>
				<i>Organizational Setting</i>	
				Kualitas Audit Internal	
				<i>Auditee Attributes</i>	
5	Beasley, Clune, dan Hermanson	2006	Efektivitas Audit Internal	Manajemen Risiko	Manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal.

Berdasarkan penjabaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas audit internal dipengaruhi secara signifikan oleh variabel-variabel sebagai berikut:

1. pengalaman audit;
2. manajemen risiko;
3. *effective internal control system*;
4. pengalaman audit;
5. *cooperation between internal and external auditor*;
6. *performance measurement*;
7. *management support*;

8. *organizational setting*;

9. kualitas audit internal.

Sedangkan *auditee attributes* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas audit internal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada:

1. Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan 2 variabel lain yaitu pendidikan dan pelatihan.

2. Obyek penelitian

Dalam penelitian ini, obyek (*locus*) penelitian berada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

3. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yang mana belum ada penelitian mengenai hal tersebut yang dilakukan di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh pengalaman auditor, manajemen risiko, pendidikan, pelatihan, efektivitas pengendalian internal dan *management support* terhadap efektivitas audit internal.

Pengalaman auditor mempengaruhi efektivitas audit internal dikarenakan semakin lama auditor bekerja dalam hal waktu dan jumlah penugasan makan

akan lebih mudah untuk mencapai tujuan audit internal itu sendiri, dalam hal ini akan meningkatkan efektivitas audit internal.

Manajemen risiko berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dikarenakan dengan dikelolanya risiko maka risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dapat direduksi, sehingga pencapaian tujuan akan jauh lebih mudah.

Pendidikan mempengaruhi efektivitas audit internal dikarenakan semakin tinggi pendidikan seorang auditor maka kualifikasi, wawasan, dan pola berpikir seorang auditor akan jauh lebih baik. Hal tersebut tentunya akan memudahkan auditor untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya guna mewujudkan tujuan organisasi.

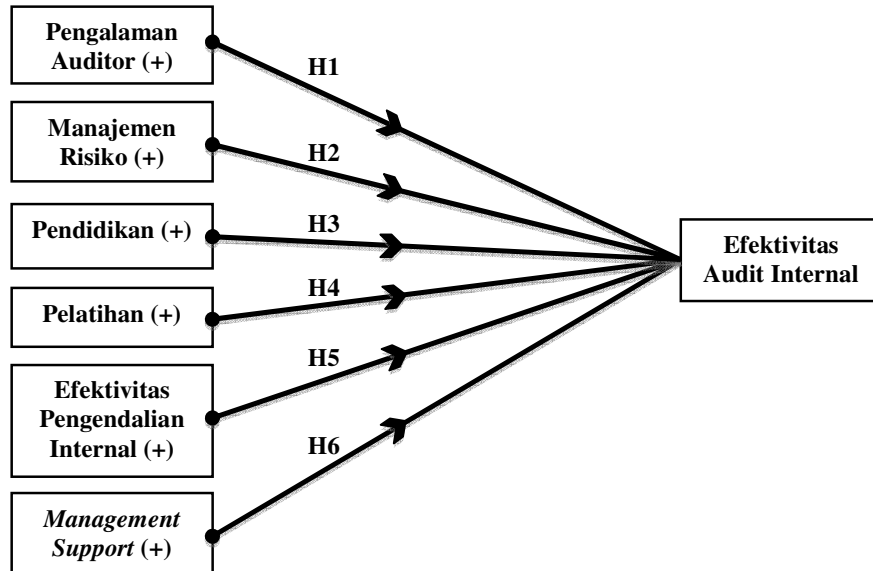
Pelatihan mempengaruhi efektivitas audit internal dikarenakan semakin banyaknya pelatihan yang diikuti oleh auditor, maka secara langsung keterampilan auditor akan meningkat juga. Sehingga proses pencapaian tujuan akan jauh lebih mudah.

Efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dikarenakan tujuan organisasi tidak akan tercapai dengan baik dan mudah jika tidak ada fungsi pengendalian yang baik pula.

Management support berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dikarenakan dukungan atau *feedback* yang bersifat positif dan tingkat responsivitas dari SKPD terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan akan mempengaruhi pencapaian dan perwujudan tujuan organisasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, 2015

2.4.Pengembangan

Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2014), di mana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, dikarenakan jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dikarenakan pada penelitian ini menggunakan rumusan masalah asosiatif dengan hubungan kasual, maka bentuk hipotesis pada penelitian ini adalah

hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono (2014), hipotesis asosiatif merupakan sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif.

2.4.1. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badara dan Saidin (2013) mengemukakan bahwa pengalaman auditor merupakan sebuah isu penting di mana hal tersebut menjadi tolak ukur seorang auditor untuk dapat dikatakan baik, handal, dan profesional. Selain itu pengalaman tersebut dapat menjadi sebuah ajang berlatih bagi para auditor untuk mendapatkan ke profesionalismenya dan hal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi auditnya (Intakhan dan Ussahawanitchakit dalam Badara dan Saidin, 2013).

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh penelitian yang dilakukan oleh (Arel *et al.*, dalam Badara dan Saidin, 2013) yang menjelaskan bahwa seiring dengan pengetahuan auditor yang terus bertambah maka menyebabkan struktur pengetahuan mereka menjadi semakin berkembang dengan baik.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka membuat mereka lebih dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya. Tentunya hal tersebut akan mempermudah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tujuan organisasi, jikalau para auditornya memiliki pengalaman yang cukup di bidang *auditing*.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,

H1: Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

2.4.2. Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Efektivitas Audit Internal

Penelitian yang dilakukan oleh Badara dan Saidin (2013) yang mengemukakan bahwa usaha suatu negara dalam mengembangkan manajemen risiko dan menjaga berlangsungnya *good governance* pada sektor publik merupakan sebuah langkah penting dan hal tersebut harus dijaga keberlangsungannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beasley, Clune, dan Hermanson (2006) yang menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

Manajemen risiko merupakan unsur penting dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terdiri dari proses identifikasi dan penilaian risiko. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa penetapan tujuan berkaitan dengan kegiatan penilaian risiko. Dengan kata lain, penerapan manajemen risiko dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,

H2: Manajemen risiko berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

2.4.3. Pengaruh Pendidikan terhadap Efektivitas Audit Internal

Pendidikan merupakan sebuah indikator penting bagi setiap negara untuk melihat sejauh mana negara tersebut berkembang, selain itu pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan semakin banyaknya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas maka negara tersebut dapat dikatakan maju.

Menurut Suwardjono (1992, h.167) menyatakan bahwa:

Pengembangan pendidikan akademis yang dimiliki oleh auditor sangat diperlukan, sehingga para auditor yang secara teoritis telah mempelajari pengauditan tidak tergelincir menjadi pragmatis akan tetapi akan menjadi lebih profesional karena mendapatkan masukan yang lebih besar mengenai profesionalisme dari pendidikan profesional yang merupakan pengembangan pendidikan akademik.

Terlebih Inspektorat sebagai lembaga fungsional pengawasan di tingkat provinsi yang memiliki kredibilitas baik, terutama dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2011-2014) yang mampu membantu Provinsi Jawa Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan⁷.

Oleh sebab itu para auditor dituntut untuk memiliki pendidikan paling rendah S1, bahkan banyak auditor yang sudah memiliki gelar S2 dan beberapa sudah mengambil pendidikan profesi akuntan (PPA). Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas individu auditor, terlebih jika auditor tersebut

⁷ Jateng Pos, Jumat, 5 Juni 2015

sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan kualifikasi yang baik maka pencapaian dan perwujudan tujuan akan mudah terealisasi.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,

H3: Pendidikan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

2.4.4. Pengaruh Pelatihan Auditor terhadap Efektivitas Audit Internal

Pelatihan adalah pengetahuan atau wawasan yang diperoleh dari luar lingkungan pendidikan non formal. Pelatihan ditujukan pada peningkatan kemampuan, sehingga pelatihan haruslah dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang membanggakan.

Selain itu pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan diri dalam menghadapi pekerjaan. Pelatihan dapat dikatakan sebagai pengetahuan tambahan yang menunjang dalam menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik. Jadi, dapat dikatakan pelatihan merupakan suatu investasi di masa datang bagi auditor dan organisasi.

Pelatihan di kalangan auditor sudah tidak asing lagi, dikarenakan hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sebagai auditor. Pelatihan merupakan alternatif yang banyak dipilih, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan akademis dengan tujuan mengembangkan keterampilan yang sama.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara rutin menyertakan auditornya untuk mengikuti pelatihan di tingkat daerah maupun pusat.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,

H4: Pelatihan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

2.4.5. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Audit Internal

Pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan efektivitas audit internal, hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang dalam poin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa:

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegitan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dengan ditetapkannya aturan mengenai pengendalian internal melalui peraturan pemerintah tersebut, implementasinya pun harus dilaksanakan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakus agar apa yang menjadi tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat terwujud.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jokippi (2009) yang mengungkapkan bahwa efektivitas pengendalian internal merupakan suatu capaian di mana tujuan organisasi terwujud dengan cara-cara yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan dan hukum yang berlaku.

Kemudian penelitian oleh Badara dan Saidin (2014) mengungkapkan bahwa efektivitas pengendalian internal mengacu pada sampai sejauh mana kontrol yang dilakukan pimpinan guna mewujudkan tujuan organisasi.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,

H5: Efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

2.4.6. Pengaruh *Management Support* terhadap Efektivitas Audit Internal

Dalam mewujudkan terciptanya efektivitas audit internal tidak mungkin hanya satu pihak saja yang berusaha untuk mewujudkan hal tersebut, melainkan harus adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan dalam hal ini adalah dukungan Inspektur selaku pimpinan tertinggi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, kemudian lingkungan eksternal adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tolak ukur penilaian dukungan SKPD dapat dilihat dari respon positif dari SKPD untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mihret dan Yismaw (2007) yang menyatakan bahwa *management support* merupakan salah satu faktor penting guna mewujudkan efektivitas audit internal.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H6: *Management support* berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel dependen dan independen.

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas audit internal.

3.1.1.1. Efektivitas Audit Internal

Efektivitas audit internal merupakan kemampuan auditor internal untuk mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Beckmerhagen *et al.* (2004), efektivitas audit internal diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. berpedoman dan paham pada standar audit yang berlaku;
2. perencanaan yang matang dan pengidentifikasian tujuan;
3. penilaian kemampuan auditor sebelum menerima tugas;
4. penilaian kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan;

Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan skala Likert, di mana skala tersebut mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata sebagai berikut (Sugiyono, 2014):

1. sangat setuju;
2. setuju;
3. ragu-ragu;
4. tidak setuju;
5. sangat tidak setuju.

Kemudian hasil jawaban responden tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan nilai dari jawaban tersebut. Dimana jawaban sangat positif akan diberi nilai 5, jawaban ragu-ragu akan diberi nilai 3, dan jawaban sangat negatif akan diberi nilai 1.

3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab perubahan atau terjadinya variabel dependen.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman auditor, manajemen risiko, pendidikan, pelatihan, efektivitas pengendalian internal, dan *management support*.

3.1.2.1. Pengalaman Auditor

Pengalaman auditor merupakan sebuah tolak ukur bagi auditor untuk menentukan kualitasnya, di mana dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki auditor akan memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi yang relevan, mendeteksi kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan. Banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan membuat auditor lebih teliti, dapat belajar dari kesalahan yang lalu dan lebih cepat dalam menyelesaikan

tugas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk. (2009), pengalaman auditor diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. lamanya bekerja sebagai auditor;
2. banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan.

Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan skala Likert, di mana skala tersebut mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata sebagai berikut (Sugiyono, 2014):

1. sangat setuju;
2. setuju;
3. ragu-ragu;
4. tidak setuju;
5. sangat tidak setuju.

Kemudian hasil jawaban responden tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan nilai dari jawaban tersebut. Dimana jawaban sangat positif akan diberi nilai 5, jawaban ragu-ragu akan diberi nilai 3, dan jawaban sangat negatif akan diberi nilai 1.

3.1.2.2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan keefektifan audit internal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Tamimi dan Al-Mazrooei (2007), manajemen risiko diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. peninjauan kinerja secara teratur dalam pengelolaan risiko;

2. efektif dalam melakukan peninjauan kinerja dan strategi manajemen risiko;
3. bimbingan kepada staf dalam mengelola risiko;
4. program pelatihan manajemen risiko;
5. perekrutan sdm yang memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko.

Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan skala Likert, di mana skala tersebut mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata sebagai berikut (Sugiyono, 2014):

1. sangat setuju;
2. setuju;
3. ragu-ragu;
4. tidak setuju;
5. sangat tidak setuju.

Kemudian hasil jawaban responden tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan nilai dari jawaban tersebut. Dimana jawaban sangat positif akan diberi nilai 5, jawaban ragu-ragu akan diberi nilai 3, dan jawaban sangat negatif akan diberi nilai 1.

3.1.2.3. Pendidikan

Merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan menumbuhkan sikap, kepercayaan, nilai, jiwa sosial, dan keterampilan yang menunjang dalam

kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2009), pendidikan diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. latar belakang pendidikan S1 Akuntansi;
2. pendidikan profesi (PPA);
3. tingkat pendidikan akademis;
4. pendidikan guna meningkatkan karir;
5. pendidikan akan membentuk kepribadian dan pengembangan wawasan.

Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan skala Likert, di mana skala tersebut mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata sebagai berikut (Sugiyono, 2014):

1. sangat setuju;
2. setuju;
3. ragu-ragu;
4. tidak setuju;
5. sangat tidak setuju.

Kemudian hasil jawaban responden tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan nilai dari jawaban tersebut. Dimana jawaban sangat positif akan diberi nilai 5, jawaban ragu-ragu akan diberi nilai 3, dan jawaban sangat negatif akan diberi nilai 1.

3.1.2.4. Pelatihan

Pelatihan adalah wawasan yang diperoleh dari luar lingkungan pendidikan akademis. Pelatihan ditujukan pada peningkatan kemampuan sehingga

pelatihan dilaksanakan dengan efektif, dan efisien untuk mencapai hasil yang membanggakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2009), pelatihan diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. frekuensi mengikuti pelatihan;
2. kesadaran mengikuti pelatihan;
3. bimbingan dari pembimbing pelatihan.

Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan skala Likert, di mana skala tersebut mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata sebagai berikut (Sugiyono, 2014):

1. sangat setuju;
2. setuju;
3. ragu-ragu;
4. tidak setuju;
5. sangat tidak setuju.

Kemudian hasil jawaban responden tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan nilai dari jawaban tersebut. Dimana jawaban sangat positif akan diberi nilai 5, jawaban ragu-ragu akan diberi nilai 3, dan jawaban sangat negatif akan diberi nilai 1.

3.1.2.5. Efektivitas Pengendalian Internal

Badara dan Saidin (2014) mengungkapkan bahwa efektivitas pengendalian internal mengacu pada sampai sejauh mana kontrol yang dilakukan pimpinan guna mewujudkan tujuan organisasi. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Jokipii (2009), efektivitas pengendalian internal diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. efisiensi aktivitas;
2. keandalan informasi;
3. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan skala Likert, di mana skala tersebut mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata sebagai berikut (Sugiyono, 2014):

1. sangat setuju;
2. setuju;
3. ragu-ragu;
4. tidak setuju;
5. sangat tidak setuju.

Kemudian hasil jawaban responden tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan nilai dari jawaban tersebut. Dimana jawaban sangat positif akan diberi nilai 5, jawaban ragu-ragu akan diberi nilai 3, dan jawaban sangat negatif akan diberi nilai 1.

3.1.2.6. *Management Support*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mihret dan Yismaw (2007), *management support* diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. respon terhadap temuan audit;
2. komitmen untuk memperkuat audit internal.

Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan skala Likert, di mana skala tersebut mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata sebagai berikut (Sugiyono, 2014):

1. sangat setuju;
2. setuju;
3. ragu-ragu;
4. tidak setuju;
5. sangat tidak setuju;

Kemudian hasil jawaban responden tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan nilai dari jawaban tersebut. Dimana jawaban sangat positif akan diberi nilai 5, jawaban ragu-ragu akan diberi nilai 3, dan jawaban sangat negatif akan diberi nilai 1.

3.2. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiyono, 2014). Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2002), populasi adalah suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dapat didefinisikan bahwa populasi merupakan sekumpulan subyek yang memiliki karakteristik tertentu dan berkaitan dengan masalah penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 33 orang.

3.3. Sensus

Dikarenakan jumlah populasi yang tergolong kecil yaitu hanya 33 orang yang merupakan jumlah keseluruhan auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, maka dalam penelitian ini menggunakan sensus. Sugiyono (2009) menerangkan bahwa sensus yaitu menggunakan keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner (angket). Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti (Sugiyono, 2014). Sedangkan menurut Creswell (2012) dalam Sugiyono (2014, h.230) *“questionnaires are form used in a survey design that participant in a study complete and return to the researcher.”*

Metode ini menggunakan penyebaran kuesioner yang telah disusun secara terstruktur, dimana sejumlah pernyataan tertulis disampaikan kepada responden untuk ditanggapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh

responden yang bersangkutan. Pernyataan tersebut berkaitan dengan data demografi responden serta opini atau tanggapan terhadap pengalaman auditor, manajemen risiko, pendidikan, pelatihan, efektivitas pengendalian internal, *management support*, serta efektivitas audit internal dari auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara membagikan kuesioner langsung ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Setiap kuesioner disertai dengan surat permohonan pengisian yang ditujukan kepada responden.

3.6. Metode Analisis Data

Dalam bagain ini dilakukan proses pengelompokan, menabulasi, penyajian data, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis.

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini.

3.6.2. Uji Instrumen

3.6.2.1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, kehandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur apabila dilihat dari stabilitas atau konsistensi internal dari jawaban atau pertanyaan jika pengamatan dilakukan secara berulang.

Kuesioner dikatakan handal (reliabel) jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Uji coba terhadap butir pertanyaan yang valid dilakukan untuk mengetahui keandalan butir pertanyaan tersebut dengan SPSS. Cara yang digunakan untuk menguji reabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*.

Kriteria pengujian uji reabilitas adalah sebagai berikut (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2013):

- $\alpha > 0.70$, konstruk (variabel) reliabel;
- $\alpha < 0.70$, konstruk (variabel) tidak reliabel.

3.6.2.2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis butir. Dasar penilaian menurut Ghozali (2013) adalah sebagai berikut:

- jika r hitung lebih $>$ r tabel dan bernilai positif, maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid atau sah;
- jika r hitung bernilai negatif atau positif namun $<$ r tabel, maka butir pernyataan dinyatakan invalid dan harus dihapus.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan model regresi berganda

terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas.

3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013).

Metode yang digunakan dalam uji ini adalah dengan melihat *normal probability plot*. Metode tersebut dirasa lebih handal dibanding hanya melihat histogram, mengingat jumlah sampel dalam penelitian ini terbilang kecil.

Normal probability plot adalah membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji terjadi ketidaksamaan *variance* pada model regresi, jika terjadi heterokedastisitas maka model regresi tersebut dapat dikatakan tidak baik. Menurut Ghozali (2013) pendeteksian heterokedastisitas dapat dilihat dari ada tidaknya pola tertentu dari grafik *scatrrerplot* antara SPRESID (residual) dan ZPRED (variabel

dependen). Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah sebagai berikut:

- adanya pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka dapat diindikasikan terjadi heterokedastisitas;
- jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.3.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen), jika terdapat korelasi antar variabel tersebut maka dapat dikatakan model regresi tersebut tidak baik. Menurut Ghozali (2013) multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dasar analisis untuk menentukan gejala multikolinearitas adalah:

- nilai *tolerance* $\geq 0,10$;
- nilai VIF ≤ 10 .

3.6.4. Pengujian Hipotesis

3.6.4.1. Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda. Hal tersebut bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Dimana,

Y : efektivitas audit internal;

a : konstanta;

b : koefisien arah regresi;

X_1 : pengalaman auditor;

X_2 : manajemen risiko;

X_3 : pendidikan;

X_4 : pelatihan;

X_5 : efektivitas pengendalian internal;

X_6 : *management support*;

e : *error*.

3.6.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan sebuah metode untuk menguji apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama/stimultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

Pengujian hipotesis menggunakan metode statistik F, dengan dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Nilai $F > 4$;
- *probability value* $< 0,05$ maka H_a diterima;
- *probability value* $> 0,05$ maka H_o ditolak.

Penghitungan Uji F dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F_{tabel} , dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- $F_{hitung} > F_{tabel} (n-k-1)$, maka H_a diterima.

Berdasarkan perhitungan statistik, variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , dan X_6) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

- $F_{hitung} < F_{tabel} (n-k-1)$, maka H_0 ditolak.

Berdasarkan perhitungan statistik, variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , dan X_6) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

3.6.4.3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing (secara individu/parsial) variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- *probability value* $< 0,05$ maka H_a diterima;
- *probability value* $> 0,05$ maka H_0 ditolak;
- $t_{hitung} > t_{tabel}$

3.6.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi memiliki rentang antara 0-1. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- nilai mendekati 0, maka kemampuan variabel-variabel independen terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen;

- sebaliknya jika nilai mendekati 1, maka variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.